

SKRIPSI

ANALISIS PENGELOLAAN KEUANGAN PADA DAERAH PEMEKARAN MELALUI VALUE FOR MONEY

**AGUNG MUHAMMAD SAID
A031191121**



kepada

**DEPARTEMEN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2023**



SKRIPSI

ANALISIS PENGELOLAAN KEUANGAN PADA DAERAH PEMEKARAN MELALUI VALUE FOR MONEY

Sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi

disusun dan diajukan oleh

**AGUNG MUHAMMAD SAID
A031191121**



kepada

**DEPARTEMEN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2023**



SKRIPSI

ANALISIS PENGELOLAAN KEUANGAN PADA DAERAH PEMEKARAN MELALUI VALUE FOR MONEY

disusun dan diajukan oleh

AGUNG MUHAMMAD SAID
A031191121

telah diperiksa dan disetujui untuk diuji

Makassar, 23 Juli 2023

Pembimbing I

Prof. Dr. Hj. Haliah, S.E., M.Si., Ak., CA
NIP 196507311991032002

Pembimbing II

Dr. Grace T. Pontoh, S.E., Ak., M.Si, CA
NIP 196503201992032002



Ketua Departemen Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Hasanuddin

Dr. Syarifuddin Hasyid, S.E., M.Si., Ak., ACPA
NIP 196503071994031003



SKRIPSI

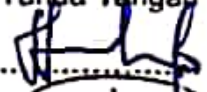
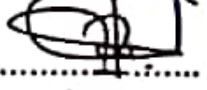
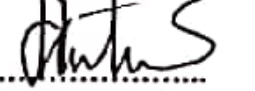
ANALISIS PENGELOLAAN KEUANGAN PADA DAERAH PEMEKARAN MELALUI VALUE FOR MONEY

disusun dan diajukan oleh

AGUNG MUHAMMAD SAID
A031191121

telah dipertahankan dalam sidang ujian skripsi
pada tanggal 16 November 2023 dan
dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui, Panitia Penguji

No.	Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Prof. Dr. Hj. Hafiah, SE., M.Si. Ak., CA	Ketua	
2.	Dr. Grace T. Pontoh, S.E., Ak., M.Si, CA.	Sekretaris	
3.	Prof. Dr. H. Arifuddin, S.E., Ak., M.Si., CA	Anggota	
4.	Dr. Ratna Ayu Damayanti, S.E., Ak., M.Soc, Sc CA	Anggota	

Ketua Departemen Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Hasanuddin



Dr. Syarifuddin Basyid, S.E., M.Si., Ak., ACPA
NIP. 196503071994031003



PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

nama : Agung Muhammad Said
NIM : A031191121
jurusan/program studi : Akuntansi

dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul

ANALISIS PENGELOLAAN KEUANGAN PADA DAERAH PEMEKARAN MELALUI VALUE FOR MONEY

adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Makassar, 13 Oktober 2023

Agung Muhammad Said



Agung Muhammad Said



Optimized using
trial version
www.balesio.com

PRAKATA

Puji syukur peneliti panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini merupakan tugas akhir untuk mencapai gelar Sarjana pada Departemen Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Hasanuddin. Peneliti mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan mendukung selama proses penyelesaian skripsi ini.

Pertama-tama, ucapan terima kasih peneliti berikan kepada Ibu Prof. Dr. Haliah, SE.,M.Si. Ak., CA., CWM., CRP., CRA. dan Ibu Dr. Grace T. Pontoh, S.E., Ak., M.Si., CA. sebagai dosen pembimbing atas waktu dan kesabaran yang telah diluangkan untuk membimbing, berdiskusi, dan memberi bantuan literatur, kepada peneliti.

Kedua, ucapan terimakasih kepada bapak Muslim S.E dan kak Bayu Purnama S.T. selaku pegawai pemerintahan Kabupaten Buton Tengah yang membantu penuliti memperoleh informasi dalam penyusunan skripsi ini Tak lupa ucapan terima kasih juga kepada orang tua peneliti bapak Abdul Said dan Ibu Herlina juga saudara-saudara peneliti beserta keluarga besar, kekasih, dan sahabat peneliti atas bantuan dan motivasi yang diberikan selama proses penelitian skripsi ini. Semoga semua pihak mendapat kebaikan berupa kesehatan dan kebahagiaan dari Tuhan Yang Maha Esa

Skripsi ini masih jauh dari sempurna, apabila terdapat kesalahan-kesalahan dalam skripsi ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis. Kedepannya penulis terbuka atas kritik dan saran membangun yang bisa membantu menyempurnakan skripsi ini.

Makassar, 23 Oktober 2023

Peneliti



ABSTRAK

Analisis Pengelolaan Keuangan Pada Daerah Pemekaran Melalui Value for Money

Analysis of Financial Management in Expansion Regions Through Value for Money

Agung Muhammad Said

Haliah

Grace T. Pontoh

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan Value for Money dalam pengelolaan keuangan di daerah pemekaran dengan menghitung serta menganalisis rasio ekonomis, efisiensi, dan efektivitas pada realiasi dan anggaran pendapatan serta realisasi dan anggaran pengeluaran yang tertera pada laporan realisasi anggaran tahun 2018-2022. Juga menghitung serta menganalisis rasio kemandirian daerah tahun 2018-2022, dengan membandingkan pendapatan asli daerah dengan pendapatan transfer. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pada rasio ekonomis 2018-2022 termasuk dalam kriteria cukup ekonomis, pada rasio efisiensi tahun 2018-2020 masuk dalam kriteria sangat efisien, efisien pada tahun 2021, dan tidak efisien pada tahun 2022, pada rasio efektivitas tahun 2018-2022 menunjukkan pada tahun 2018 masuk pada kategori efektif, dan pada tahun 2019-2022 masuk kriteria sangat efektif. Tingkat kemandirian daerah di Buton Tengah sendiri termasuk dalam kategori Instruktif dimana masih sangat bergantung pada pendanaan pemerintah pusat.

Kata kunci: daerah pemekaran, value for money, ekonomis, efisiensi, efektivitas

This research aims to analyze the implementation of Value for Money in financial management in expansion regions by calculating and analyzing economic, efficiency, and effectiveness ratios in revenue and expenditure realization reports for the years 2018-2022. It also calculates and analyzes the regional self-reliance ratio for the years 2018-2022 by comparing local revenue with transfer income. The research results indicate that in the economic ratio for 2018-2022, it falls within the criteria of being sufficiently economic. In the efficiency ratio, it was considered highly efficient for the years 2018-2020, efficient in 2021, and not efficient in 2022. In the effectiveness ratio for 2018-2022, it was found to be effective in 2018 and highly effective from 2019 to 2022. The level of regional self-reliance in Buton Tengah is classified as instructive, indicating a significant dependency on central government funding.

Keywords: expansion regions, value for money, economical, efficiency, effectiveness



DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	v
PRAKATA.....	vi
ABSTRAK.....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
 BAB I PENDAHULUAN.....	 1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan Penelitian.....	5
1.4 Kegunaan Penelitian	5
1.5 Sistematika Penulisan	6
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	 8
2.1 Tinjauan Teori	8
2.1.1 Keuangan Daerah.....	8
2.1.2 Organisasi Sektor Publik.....	9
2.1.3 Indikator Kinerja.....	9
2.1.4 Penilaian Kinerja.....	11
2.1.5 Penilaian Kinerja Value For Money	12
2.1.6 Elemen Penilaian Value For Money	13
2.1.7 Kemandirian Keuangan Daerah	16
2.1.8 Rasio Kemandirian Keuangan Daerah	17
2.2 Kerangka Pemikiran	18
 BAB III METODE PENELITIAN.....	 20
3.1 Rancangan Penelitian	20
3.2 Tempat dan Waktu Penelitian.....	20
3.3 Populasi dan Sampel.....	20
3.4 Jenis dan Sumber Data	21
3.5 Teknik Pengumpulan Data	21
3.5.1 Dokumentasi.....	22
3.5.2 Wawancara.....	22
3.6 Teknik Analisis Data	23
3.6.1 Pengukuran Ekonomis	23
3.6.2 Pengukuran Efisiensi	24
3.6.3 Pengukuran Efektivitas	24
3.6.4 Rasio Kemandirian.....	25
 HASIL PENELITIAN	 26
1 Gambaran Umum Objek Penelitian	26
2 Data Penelitian	28



4.3 Analisis dan Pembahasan	29
4.3.1 Rasio Ekonomis.....	29
4.3.2 Rasio Efisiensi	30
4.3.3 Rasio Efektivitas	32
4.3.4 Analisis Penerapan Value for Money	33
4.3.5 Kemandirian Daerah	35
BAB V PENUTUP	38
5.1 Kesimpulan.....	38
5.2 Saran.....	38
5.3 Keterbatasan Penelitian.....	40
DAFTAR PUSTAKA.....	41
LAMPIRAN	44



DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
2.1 Pola Hubungan Pemerintah Pusat Dan Daerah.....	18
3.1 Kriteria Penilaian Rasio Ekonomis.....	23
3.2 Kriteria Penilaian Rasio Efisiensi.....	24
3.3 Kriteria Penilaian Rasio Efektivitas.....	25
4.1 Anggaran dan Realisasi Belanja 2018-2022.....	28
4.2 Anggaran dan Realisasi Pendapatan 2018-2022.....	28
4.3 Realisasi Pendapatan Transfer dan PAD 2018-2022.....	28
4.4 Rasio Ekonomis 2018-2022.....	29
4.5 Rasio Efisiensi 2018-2022.....	30
4.6 Rasio Efektivitas 2018-2022.....	32
4.7 Rasio Kemandirian 2018-2022.....	36



DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
2.1 Value For Money Chain	13
2.2 Kerangka Pemikiran.....	19
4.1 Peta Buton Tengah pada Provinsi Sulawesi Tenggara.....	26
4.2 Grafik Rasio Ekonomis.....	29
4.3 Grafik Rasio Efisiensi	31
4.4 Grafik Rasio Efektivitas	32
4.5 Grafik Rasio Kemandirian	36



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1 Biodata.....	44
2 Peta Teori.....	45
3 Laporan Realisasi Anggaran 2018.....	50
4 Laporan Realisasi Anggaran 2019.....	53
5 Laporan Realisasi Anggaran 2020.....	55
6 Laporan Realisasi Anggaran 2021.....	57
7 Laporan Realisasi Anggaran 2022.....	59



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sejak dimulainya penerapan otonomi daerah pada era reformasi telah melahirkan banyak daerah pemekaran yang menjadi daerah otonom baru di Indonesia. Syarifuddin dan Damayanti (2015) menjelaskan ada dua tujuan dari diadakannya pemekaran wilayah ini. Pertama, pemekaran wilayah dapat mendorong pelayanan publik lebih efektif dan efisien. Kedua pemekaran wilayah dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui pemanfaatan sumber daya lokal yang tersedia. Dengan demikian dapat mendorong terjadinya desentralisasi. Menurut UNDP (2000) desentralisasi mengacu pada restrukturisasi atau reorganisasi kewenangan guna menciptakan tanggung jawab bersama antar lembaga pemerintah. Lebih lanjut, Syarifuddin dan Damayanti (2013) menjelaskan dengan adanya desentralisasi diharapkan dapat meningkatkan daya tanggap, transparansi, dan akuntabilitas pemerintah daerah. Serta peningkatan pada kualitas pelayanan hukum, efisiensi dan efektivitas pada pemerintah daerah.

Walau begitu desentralisasi memiliki beberapa kelemahan, Akhmad (2019) menjelaskan kelemahan desentralisasi adalah terkait dengan stabilitas nasional, terutama ketika tidak diiringi dengan langkah-langkah yang memadai untuk menjamin stabilitas tersebut. Risiko terbesar dari implementasi desentralisasi fiskal di negara-negara berkembang adalah kemungkinan terjadinya instabilitas makroekonomi. Akhmad (2019) mengemukakan pengalaman telah



akan bahwa pelaksanaan desentralisasi fiskal yang tidak disertai perencanaan dan implementasi yang baik dapat mengakibatkan pengeluaran yang

lebih besar daripada pendapatan yang dihasilkan, sehingga menyebabkan penurunan kualitas pelayanan publik dan menempatkan tekanan pada pemerintah pusat untuk mencari tambahan dana atau pinjaman.

Pelaksanaan desentralisasi fiskal mendorong daerah memiliki kebebasan untuk menjalankan pengelolaan keuangan sendiri sesuai kebutuhan mereka. dalam hal ini dapat dimaknai dengan istilah “membelanjai diri sendiri”. Manan (1994:204) menjelaskan istilah “membelanjai diri sendiri” dapat diartikan sebagai pendapatan sendiri, menunjukkan bahwa daerah diharuskan mempunyai sumber sumber pendapatan sendiri. Pemerintah daerah sangat perlu mengelola keuangan daerah secara efektif, karena itu pengawasan kinerja dalam pengelolaan keuangan sangat diperlukan.

Bastian (2006:274) memberikan definisi bahwa kinerja mencerminkan sejauh mana suatu kegiatan atau program telah mencapai visi, misi, dan sasaran yang sudah ditentukan. Pengukuran kinerja memiliki peran penting untuk berbagai jenis organisasi, termasuk pemerintahan. Melalui pengukuran kinerja, pemerintah dapat menggunakan data dan informasi sebagai panduan dalam pengambilan keputusan, alokasi sumber daya, dan evaluasi kinerja pemerintah. Dengan menggunakan pengukuran kinerja, pemerintah dapat memiliki gambaran tercapainya sebuah sasaran dan tujuan yang sudah ditetapkan. Indikator kinerja digunakan sebagai alat pengukuran kinerja. Bastian (2006:267) menjelaskan Indikator kinerja adalah suatu cara untuk mengukur sejauh mana pencapaian target yang telah ditetapkan, menggunakan ukuran baik kualitatif maupun kuantitatif. Indikator ini mempertimbangkan aspek input, output, outcome, manfaat, dan dampak, termasuk juga indikator negatif untuk setiap tingkat indikator kan asumsi yang telah ditetapkan. Dalam mengukur kinerja, terdapat dua yang dapat digunakan, yaitu *balance scorecard* dan *value for money*.



Pratiwi dan Ela (2017:11) menjelaskan *Balance scorecard* biasanya diterapkan dalam penilaian kinerja perusahaan komersial, sementara *value for money* lebih sering digunakan untuk mengevaluasi kinerja sektor publik.

Value for money seperti yang dijelaskan oleh Mahmudi (2007:81) merupakan pendekatan pengukuran kinerja yang bertujuan untuk menilai aspek ekonomis, efisiensi, dan efektivitas dari suatu kegiatan, program, atau organisasi. Lebih lanjut, konsep *value for money* memiliki manfaat dalam pelayanan publik, seperti yang dijelaskan oleh Mardiasmo (2009:7) dalam hal ini, pemerintah daerah nantinya bisa melakukan pelayanan yang tepat sesuai sasaran dan peningkatan kualitas pelayanan bagi masyarakatnya. Penurunan biaya yang tidak perlu juga menjadi hasil dari penerapan *value for money* ini sehingga anggaran yang ada lebih terfokus pada kepentingan publik. Tak hanya itu, penerapan konsep *value for money* juga berdampak pada meningkatnya kesadaran akan penggunaan uang publik (*public costs awareness*). Hal ini menjadi fondasi bagi pelaksanaan akuntabilitas publik, dimana pemerintah daerah diharapkan untuk bertanggung jawab terhadap pengelolaan anggaran dan memastikan penggunaannya transparan kepada masyarakat.

Dengan demikian, penerapan konsep *value for money* membawa manfaat bagi pemerintah daerah dan masyarakatnya. Selain memberikan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan anggaran dan pelayanan publik, konsep ini juga menguatkan akuntabilitas publik serta kesadaran akan penggunaan uang publik. Semua ini berkontribusi pada peningkatan kualitas pemerintahan dan kesejahteraan masyarakat di tingkat daerah, yang merupakan nilai fundamental dari pelaksanaan otonomi daerah yang nantinya membantu meningkatkan

ian daerah. Untuk mengetahui tingkat kemandirian daerah, dapat n rasio kemandirian daerah.



Halim (2004) menjelaskan rasio kemandirian keuangan daerah berfungsi sebagai indikator untuk menunjukkan sejauh mana suatu daerah bergantung pada sumber pendanaan luar. Rasio kemandirian yang lebih tinggi menandakan berkurangnya ketergantungan pada entitas pendukung luar seperti pemerintah pusat dan provinsi. Sebaliknya, rasio otonomi yang lebih rendah menunjukkan ketergantungan daerah yang tinggi pada pihak luar. Untuk menganalisis tingkat kemandirian daerah dan penerapan *value for money* sejak diimplementasikannya otonomi daerah penelitian ini dilakukan di pemerintah kabupaten Buton Tengah, yang berlokasi provinsi Sulawesi Tenggara, Indonesia. Kabupaten ini berdiri sebagai entitas terpisah dari Kabupaten Buton melalui pengesahan formal pada tahun 2014. Salah satu alasan utama di balik pemekaran wilayah Buton Tengah adalah permasalahan aksesibilitas. Wilayah Buton Tengah secara geografis terpisah dari Pulau Buton, sementara ibu kota Kabupaten Buton berada di Pasarwajo yang terletak di Pulau Buton. Akibatnya, pelayanan publik dan pengawasan di wilayah ini menjadi rumit dan memerlukan biaya tinggi serta waktu yang lama. Prosesnya melibatkan perjalanan laut menuju Kota Baubau dan kemudian dilanjutkan dengan perjalanan darat menuju Pasarwajo yang berada di ujung timur Pulau Buton.

Pemekaran wilayah Buton Tengah memberikan peluang untuk mengatasi masalah aksesibilitas tersebut. Sejak menjadi daerah otonomi baru, Kabupaten Buton Tengah menghadapi banyak tantangan dalam pengelolaan keuangannya. Namun demikian, melalui hasil pemeriksaan laporan keuangannya, kabupaten ini telah berhasil meraih lima kali opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Pada tahun 2019, daerah yang dimekarkan sejak

14 ini berhasil mencatatkan nilai tertinggi dibandingkan dengan daerah tara 17 kabupaten/kota yang ada di Provinsi Sulawesi Tenggara.



1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan dari latar belakang di atas, diperoleh rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut.

1. Apakah pengelolaan keuangan di Buton Tengah dikategorikan ekonomis berdasarkan konsep *value for money*?
2. Apakah pengelolaan keuangan di Buton Tengah dikategorikan efisien berdasarkan konsep *value for money*?
3. Apakah pengelolaan keuangan di Buton Tengah dikategorikan efektif berdasarkan konsep *value for money*?
4. Apakah pengelolaan keuangan di Buton Tengah dikategorikan mandiri?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan di atas, maka tujuan penelitian ini sebagai berikut.

1. Untuk menganalisis rasio ekonomis pada pengelolaan keuangan di Buton Tengah berdasarkan konsep *value for money*.
2. Untuk menganalisis rasio efisiensi pada pengelolaan keuangan di Buton Tengah berdasarkan konsep *value for money*.
3. Untuk menganalisis rasio efektivitas pada pengelolaan keuangan di Buton Tengah berdasarkan konsep *value for money*.
4. Untuk menganalisis rasio kemandirian keuangan daerah di kabupaten Buton Tengah.

1.4 Kegunaan Penelitian



Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan secara teoretis dan praktisi sebagai berikut.

1. Kegunaan Teoretis: Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bukti empiris mengenai penerapan konsep *value for money* dalam pengelolaan keuangan dan keterkaitannya dengan kemandirian daerah.
2. Kegunaan Praktis: Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi Pemerintah Kabupaten Buton Tengah mengenai pengelolaan keuangan berdasarkan *value for money* dan kaitannya dengan kemandirian daerah.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan yang digunakan dalam penelitian ini mengikuti pedoman penulisan skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin yang terbagi menjadi lima bab.

BAB I adalah pendahuluan. Bab ini menjelaskan tentang latar belakang dari penelitian, rumusan masalah, tujuan dari penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan yang digunakan.

BAB II adalah tinjauan pustaka. Bab ini menjelaskan landasan teori yang digunakan yang terdiri dari teori mengenai keuangan daerah, organisasi sektor publik, konsep kinerja, indikator kinerja, penilaian kinerja, penilaian kinerja *value for money*, komponen dan elemen konsep *value for money*, kemandirian keuangan daerah, rasio kemandirian keuangan daerah, serta juga berisi gambaran kerangka pemikiran.

BAB III adalah metode penelitian. Bab ini menjelaskan mengenai rancangan penelitian, tempat dan waktu penelitian, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, serta teknik analisis data,

BAB IV adalah hasil penelitian. Bab ini menjelaskan hasil dan pembahasan dari penelitian yang dilakukan, berupa deskripsi objek penelitian, hasil perhitungan dan analisis dari hasil perhitungan data berdasarkan teori *value for money* dan kemandirian daerah.



BAB V adalah kesimpulan. Bagian ini menguraikan kesimpulan yang ditarik dari temuan penelitian, beserta saran dan kendala yang dapat dipertimbangkan terkait dengan hasil penelitian.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Teori

2.1.1 Keuangan Daerah

Peraturan Pemerintah (PP) No. 12 Tahun 2019 pasal 1 menyebutkan, “Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut”. Hal ini juga ditegaskan oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 77 Tahun 2020 yang menyebutkan bahwa “Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah”. Keuangan daerah dalam konteks ini mengacu pada berbagai biaya yang dibayar oleh masyarakat, seperti pajak dan retribusi daerah. Pajak dan retribusi ini menjadi bagian dari kekayaan daerah dan berkontribusi pada dana yang terkumpul dari sumber-sumber tersebut. Dana ini nantinya digunakan oleh daerah untuk melakukan belanja sesuai dengan kebutuhan dan prioritas daerah tersebut. Dengan kata lain, dana yang terhimpun dari masyarakat berfungsi sebagai sumber daya yang penting bagi pemerintahan daerah dalam menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya.

Dalam prakteknya, pengelolaan keuangan daerah memerlukan kebijakan yang bijaksana dan transparan agar dana yang dikumpulkan dapat diarahkan

menuhi kebutuhan masyarakat dan pembangunan daerah. Penting bagi ah daerah melakukan pengelolaan keuangan dengan cermat dan



memprioritaskan alokasi dana untuk proyek dan program yang memberikan manfaat terbesar bagi masyarakat. Dengan begitu, keuangan daerah dapat menjadi alat yang kuat untuk mencapai pertumbuhan dan kemajuan yang berkelanjutan.

2.1.2 Organisasi Sektor Publik

Organisasi di ranah publik memiliki sifat dan karakteristik yang unik. Satu atribut utamanya adalah sebagai entitas nirlaba atau non profit, tidak mementingkan pencarian laba finansial, melainkan difokuskan pada pemberian layanan dan kontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Menurut definisi American Accounting Association (1970) yang dikutip dalam Renyowidjoyo (2013:9), organisasi sektor publik memiliki tujuan yang didefinisikan menjadi dua, Pertama, memberikan data yang dibutuhkan untuk mengelola operasi secara efisien, efektif, dan ekonomis, serta mengalokasikan sumber daya yang diurus oleh organisasi. Aspek ini erat kaitannya dengan pengawasan dan pengendalian manajemen. Kedua, memberikan informasi yang memungkinkan para pemimpin untuk menggambarkan bagaimana mereka menangani tanggung jawab program serta pemanfaatan sumber daya yang termasuk dalam wilayah tanggung jawab mereka, juga membantu pegawai pemerintah dalam mengungkapkan dengan jujur hasil dari operasi pemerintahan dan penggunaan dana publik (*Akuntabilitas*).

2.1.3 Indikator Kinerja

Dalam Peraturan Kementerian Dalam Negeri No. 77 Tahun 2020 “Indikator kinerja merupakan ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari program, kegiatan dan sub kegiatan yang direncanakan meliputi masukan, keluaran, dan hasil”.



Indikator Kinerja, menurut Bastian (2006:274), didefinisikan sebagai pencapaian suatu kegiatan untuk mencapai tujuan, visi, dan misi organisasi. indikator standar, individu yang memiliki kecenderungan untuk mencapai

tingkat kinerja yang tinggi dianggap produktif, sedangkan individu yang memiliki kecenderungan untuk mencapai tingkat kinerja yang rendah dianggap tidak produktif.

Indikator kinerja, menurut Mahsun (2006), adalah ukuran yang dapat digunakan secara kuantitatif untuk menunjukkan efektivitas tujuan sebuah organisasi. Sementara itu, Menurut Bastian (2006:267), indikator kinerja dapat diartikan sebagai alat ukur yang menggambarkan sejauh mana suatu sasaran dan tujuan telah tercapai. Indikator tersebut mencakup penghitungan terhadap beberapa aspek, yaitu.

1. Indikator masukan (*input*) meliputi semua elemen yang diperlukan untuk menjalankan suatu kegiatan dengan efisien, termasuk dana, sumber daya manusia, serta informasi pendukung.
2. Indikator keluaran (*output*) merupakan hasil langsung yang diekspektasikan pada pelaksanaan kegiatan, baik berupa produk fisik maupun nonfisik yang dihasilkan.
3. Indikator hasil (*outcome*) perkiraan dampak atau efek jangka menengah dari kegiatan, yang menggambarkan perubahan yang terjadi sebagai hasil dari kegiatan tersebut.
4. Indikator manfaat (*benefit*) berkaitan dengan hasil akhir dari suatu kegiatan, yang berupa perkiraan manfaat yang diperoleh dari pelaksanaan kegiatan tersebut. Ini mencakup tujuan akhir atau dampak positif yang diharapkan dari kegiatan yang telah dilakukan.
5. Indikator dampak (*impact*) mencerminkan pengaruh atau dampak yang timbul oleh kegiatan tersebut, berupa dampak positif ataupun dampak negatif, yang terkait dengan setiap tingkatan indikator berdasarkan asumsi yang telah ditetapkan.

Selanjutnya, Bastian (2006:267) juga menjelaskan ada beberapa syarat yang wajib dipenuhi oleh suatu indikator kinerja, yaitu sebagai berikut.

1. Spesifik: Indikator harus dirumuskan dengan jelas dan tidak memunculkan keraguan dalam interpretasinya. .
2. Bisa diukur secara objektif: Indikator harus dapat diukur baik secara kuantitatif maupun kualitatif, dan hasil pengukurannya harus konsisten dan dapat diandalkan.
3. Relevan: Indikator kinerja harus berhubungan langsung dengan aspek objektif yang ingin diukur,
Dapat dicapai: Indikator harus mencerminkan sesuatu yang penting dan bermanfaat, dan menunjukkan pencapaian di seluruh input, output, outcome, benefit, dan impact.



5. Fleksibel: Indikator harus mampu menyesuaikan diri dengan perubahan yang terjadi selama pelaksanaan dan hasil kegiatan.
6. Efektif: Data dan informasi yang terkait dengan indikator kinerja harus dapat dikumpulkan, diolah, dan dianalisis dengan biaya yang terjangkau dan sesuai dengan ketersediaan sumber daya.

Mardiasmo (2009:127) mengartikan istilah indikator kinerja sebagai suatu cara penilaian kinerja yang *indirect*, yang mencerminkan hal-hal yang hanya menunjukkan atau mengindikasikan performa suatu entitas. Dalam konteks pemerintahan, peran indikator kinerja, menurut Mardiasmo (2009:128), adalah sebagai berikut.

1. Membantu memperjelas tujuan organisasi Untuk mengevaluasi target akhir (*final outcome*) yang telah dihasilkan,
2. Mengevaluasi pencapaian target akhir (*final outcome*) yang telah dicapai.
3. Digunakan sebagai referensi untuk menentukan skema insentif manajerial.
4. Memberikan informasi kepada masyarakat untuk melakukan pemilihan dalam menggunakan layanan pemerintah.
5. Menetapkan standar kinerja yang harus dicapai.
6. Menunjukkan tingkat efektivitas pelaksanaan kegiatan.
7. Membantu dalam menentukan aktivitas yang paling efektif secara biaya untuk mencapai sasaran yang ditetapkan.
8. Mengidentifikasi wilayah, bagian, atau proses yang berpotensi untuk dilakukan penghematan biaya.

2.1.4 Penilaian Kinerja

Mulyadi (2004:416) menjelaskan penilaian kinerja dapat diartikan sebagai praktik yang secara berkala menilai efektivitas pelaksanaan operasional suatu entitas, bagian-bagian di dalamnya, dan individu-individu yang terlibat, dengan mengacu pada sasaran, norma, dan pedoman yang telah ditentukan terlebih dahulu. Keberhasilan suatu kegiatan dievaluasi oleh manajemen berdasarkan kriteria, standar, dan tujuan yang telah ditentukan dan disepakati pada perencanaan. Tujuan dari penilaian kinerja ini adalah untuk mengevaluasi hasil

out dari suatu kegiatan dengan harapan bahwa hasil evaluasi akan
 u manajer unit kerja untuk meningkatkan dan memperbaiki kinerja



mereka. Sementara itu, Mathis dan Jacson (2006:382) mendefinisikan penilaian kinerja (*performance appraisal*) sebagai praktek mengevaluasi tingkat ketepatan karyawan dalam menjalankan tugas-tugas pekerjaan mereka sebanding dengan norma-norma yang telah ditetapkan, serta mengomunikasikan data ini kepada karyawan.

Dengan demikian, penilaian kinerja merupakan proses yang penting dalam mengukur sejauh mana pencapaian standar dan tujuan yang sudah ditetapkan organisasi. Dengan melakukan evaluasi dan penilaian secara berkala, organisasi dapat mengidentifikasi keberhasilan dan kelemahan dalam kinerja, serta memberikan masukan yang berguna bagi perbaikan dan pengembangan karyawan dan unit kerja kemudian mengomunikasikan informasi tersebut kepada karyawan.

2.1.5 Penilaian Kinerja Value For Money

Penilaian kinerja berdasarkan konsep *value for money*, seperti yang dijelaskan oleh Mahmudi (2007:81) merupakan pendekatan pengukuran kinerja yang bertujuan untuk menilai aspek ekonomis, efisiensi, dan efektivitas dari suatu kegiatan, program, atau organisasi. Di sektor publik, Pratiwi dan Ela (2017:11) menyatakan bahwa *value for money* digunakan sebagai alat untuk mengukur kinerja, khususnya dalam pengelolaan anggaran pemerintah. Penilaian kinerja *value for money* menjadi sangat penting bagi organisasi sektor publik karena pemerintah, sebagai perwakilan rakyat, wajib bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan negara dan mempertanggungjawabkan setiap pengeluaran anggaran.

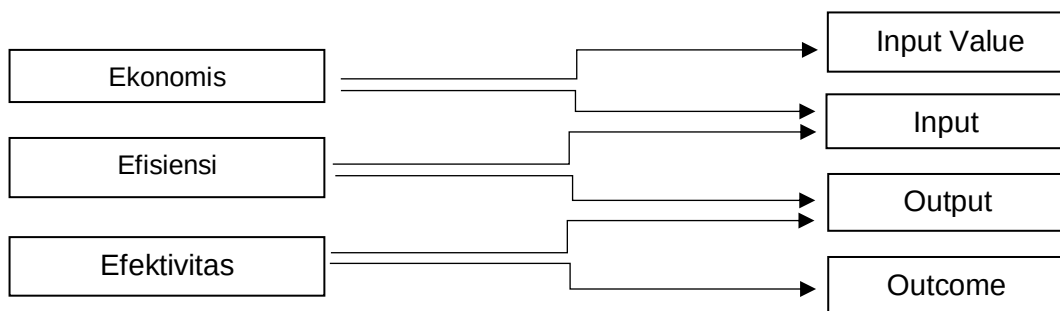
Bastian (2006:335) menjelaskan *value for money* menjadi fokus utama dalam mengukur kinerja organisasi pemerintah, dan hal ini mencakup penilaian efisiensi, efektivitas, dan aspek ekonomis dalam pengukuran kinerja. Untuk diingat bahwa menilai kinerja pemerintah tidak boleh terbatas hanya



pada hasil yang dicapai semata. Lebih dari itu, penilaian tersebut harus merangkul seluruh siklus, mulai dari masukan, melalui proses menjadi keluaran, hingga akhirnya mencapai dampak yang diinginkan. Dengan mengakui tiga dimensi ini secara holistik, pemerintah mampu mengukur dimensi ekonomis, efisiensi, serta efektivitas dari setiap kegiatan atau program yang dijalankan.

2.1.6 Elemen Penilaian Value For Money

Mardiasmo (2009:130) menjelaskan *Value for money* merupakan konsep pengelolaan organisasi sektor publik yang didasarkan pada tiga elemen utama seperti pada gambar berikut ini.



Sumber: Mardiasmo (2009)

Gambar 2.1 Value For Money Chain

a. Ekonomis

Mardiasmo (2009:131) menjelaskan ekonomis didasari pada perolehan input dengan kualitas dan kuantitas tertentu dengan harga terendah. Ekonomis, dalam konteks ini, membantu mewujudkan kemampuan entitas sektor publik untuk mengurangi konsumsi sumber daya dengan mengesampingkan pengeluaran yang tidak perlu dan tidak efektif. gagasan ekonomis selaras erat dengan gagasan biaya yang diperlukan dalam mendapatkan satu unit input. Dengan demikian, penggunaan sumber daya di bawah alokasi yang dianggarkan menandakan efisiensi, sementara melebihi anggaran menandakan adanya pemborosan.



Oleh karena itu, agar suatu entitas sektor publik dikatakan ekonomis, menjadi sebuah keharusan untuk mengurangi pemborosan sumber daya input.

b. Efisiensi

Mardiasmo (2009:131) menjelaskan efisiensi menggambarkan usaha mencapai output yang maksimal dengan memanfaatkan input yang ada secara optimal atau dengan mengurangi pemakaian input demi menghasilkan output yang diinginkan. Pengukuran efisiensi dapat dilakukan dengan membandingkan pencapaian hasil dengan target yang disepakati atau tujuan yang ditetapkan. Sebuah entitas sektor publik dianggap efisien jika mampu menghasilkan output yang telah ditentukan dengan menggunakan sejumlah input yang seminimal mungkin atau menghasilkan output sebesar-besarnya dengan input tertentu (*spending well*). Penting dicatat bahwa konsep efisiensi bersifat relatif atau tidak mutlak, karena dapat bervariasi tergantung pada tujuan dan konteks masing-masing situasi.

c. Efektivitas

Mardiasmo (2009:131) menjelaskan efektivitas adalah pencapaian hasil program yang selaras dengan target yang telah ditetapkan. Sederhananya, efektivitas memerlukan penilaian hasil, semakin besar dampak output terhadap pencapaian hasil yang diinginkan, semakin mencuat efektivitas entitas sektor publik tersebut. Karena organisasi sektor publik sering menghasilkan output yang tidak berwujud (*intangible*), dan tidak langsung (*indirect*), mengukur efektivitas sering menghadapi tantangan. Tantangan ini muncul karena pencapaian hasil atau outcome seringkali tidak langsung terlihat, baru terlihat dalam jangka panjang setelah program berakhir. Akibatnya, mengukur efektivitas cenderung dilakukan

subjektif sebelumnya, dapat dibuat dalam bentuk penilaian (*judgment*)



Dalam konteks *value for money*, ketiga elemen di atas (ekonomi, efisiensi, dan efektivitas) merupakan hal yang fundamental. Namun, Mardiasmo (2009:4). juga menyatakan bahwa terdapat dua elemen tambahan yang perlu diperhatikan, yaitu keadilan (*equity*) dan pemerataan (*equality*). Keadilan menekankan kesetaraan kesempatan sosial (*social opportunity*) yang sama dalam hal pelayanan. Selain itu, penting untuk mendistribusikan penggunaan dana publik secara merata (*equality*). sehingga tidak hanya menguntungkan kelompok tertentu, melainkan bermanfaat bagi seluruh masyarakat.

Mardiasmo (2009:4) juga mengungkapkan bahwa dalam mengevaluasi nilai lebih dari nilai (*value for money*), langkah-langkah awal yang ditempuh adalah menetapkan indikator-indikator untuk input, output, dan outcome. Organisasi diharapkan merancang indikator-indikator ini sebagai instrumen pengukuran yang terkait erat dengan pencapaian tujuan, visi, serta misi dari entitas tersebut. Setelah indikator-indikator ini ditetapkan, langkah berikutnya adalah menggali pemahaman yang mendalam tentang esensi input, output, dan outcome tersebut. Konsep fundamentalnya dapat diuraikan sebagai berikut.

a. Input merujuk pada beragam sumber daya yang ditanamkan untuk mewujudkan kebijakan, program, dan aktivitas. Contohnya, jumlah tenaga perawat di sebuah unit kesehatan, luas lahan yang digunakan untuk membangun fasilitas masyarakat, jumlah pegawai di dalam suatu perusahaan, dan elemen-elemen serupa. Dimensi input bisa diukur dalam angka, seperti jumlah perawat, luas lahan, atau jumlah pegawai, ataupun diartikan dalam nilai moneter, seperti biaya lahan, gaji perawat atau pegawai, dan lain sebagainya.

b. Output adalah hasil yang tercapai dari pelaksanaan program, aktivitas, atau

- i. Output mencerminkan apa yang berhasil dihasilkan dari pelaksanaan atau aktivitas tersebut.



c. Outcome mencerminkan dampak yang timbul akibat pelaksanaan suatu aktivitas tertentu. Outcome sering kali berkaitan dengan tujuan atau target yang ingin dicapai melalui pelaksanaan aktivitas tersebut.

2.1.7 Kemandirian Keuangan Daerah

Menurut Wike dan Halmawati (2020), kemandirian keuangan daerah merujuk pada kapasitas badan pemerintahan daerah untuk secara independen mengalokasikan sumber daya guna membiayai kegiatan pemerintahan, bertanggung jawab atas upaya pembangunan, dan memberikan layanan kepada masyarakat yang turut serta berkontribusi pada pajak dan retribusi. Pendapatan yang berasal dari pajak dan retribusi ini memainkan peran penting dalam suatu daerah karena menjadi sumber utama pendapatan yang sangat dibutuhkan. Tilawatil dan Rina (2019) menjelaskan kemandirian daerah dapat diukur dengan membandingkan skala pendapatan asli daerah (PAD) dengan pendapatan yang diperoleh dari sumber eksternal, seperti bantuan atau pinjaman pemerintah pusat. Semakin besar proporsi PAD terhadap total pendapatan daerah, maka semakin nyata kemandirian keuangan daerah tersebut. Sebaliknya, jika sumber eksternal terbesar dalam menyuplai pendapatan daerah, maka tingkat kemandirian keuangan cenderung rendah. tingkat otonomi keuangan daerah dapat diartikan sebagai indikator kemampuan suatu daerah untuk melaksanakan tanggung jawab pemerintahannya sendiri. Hal ini ditentukan dengan menilai sejauh mana suatu daerah mengandalkan sumber-sumber pendapatan di luar pendapatan daerah otonominya. Suatu daerah dianggap memiliki otonomi keuangan yang tinggi ketika menunjukkan ketergantungan yang minim pada sumber pendapatan eksternal, yang tidak berasal dari pendapatan asli daerah.



Merujuk pada Djpk Kemenkeu (2011:22), “tujuan utama pelaksanaan daerah adalah untuk mencapai kemandirian daerah. Hal ini dapat dinilai

dengan membandingkan pendapatan asli daerah dengan total pendapatan daerah". Rasio kemandirian yang lebih tinggi menunjukkan kemandirian yang tinggi dan berkurangnya ketergantungan pada bantuan pemerintah pusat. Sebaliknya, rasio yang lebih rendah menunjukkan ketergantungan daerah yang lebih besar pada bantuan pemerintah pusat. Mahardika (2014) menjelaskan bahwa untuk menilai kemampuan keuangan daerah dalam membiayai pengeluarannya, perlu melihat seberapa besar kontribusi masing-masing sumber pendapatan asli daerah (PAD) terhadap total PAD. Selain itu, penting juga untuk menilai seberapa efektifnya target perencanaan pendapatan terhadap realisasi pendapatan yang berhasil dihimpun. Hal ini dapat memberikan gambaran lebih jelas tentang sejauh mana daerah dapat mengandalkan sumber-sumber pendapatan internalnya untuk membiayai kegiatan dan pelayanan publik.

2.1.8 Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Mengukur kemandirian keuangan daerah melibatkan menyandingkan pendapatan asli daerah (PAD) dengan alokasi fiskal dari pemerintah pusat, sehingga menjadikan PAD sebagai ukuran penting untuk mengevaluasi sejauh mana kemandirian keuangan daerah. Halim (2004:67) menjelaskan PAD meliputi keseluruhan pendapatan daerah yang berasal dari sumber ekonomi daerah. Sumber pendapatan PAD ini meliputi penerimaan pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah, dan pendapatan asli daerah lainnya yang sah. Oleh karena itu, harapannya adalah agar daerah dapat meningkatkan PAD untuk mencapai tingkat kemandirian keuangan yang lebih tinggi. Dengan cara ini, daerah menjadi lebih mandiri dalam membiayai berbagai kegiatan dan layanan publik tanpa terlalu tergantung pada bantuan atau transfer dari pemerintah pusat.



enurut Paul Hersey dan Kenneth Blanchard dalam Halim (2004:188), empat pola hubungan yang menggambarkan tingkat kemandirian daerah.

1. Pola hubungan instruktif. Dalam pola ini, pemerintah pusat memiliki peran yang sangat dominan dibandingkan dengan pemerintah daerah, yang menunjukkan pemerintah daerah memiliki ketergantungan yang signifikan pada keputusan dan dukungan pemerintah pusat.
2. Pola hubungan konsultatif. Dalam pola ini, menandakan berkurangnya campur tangan pemerintah pusat, yang menandakan bahwa daerah bisa dikatakan telah memiliki kemandirian dalam ranah tertentu.
3. Pola hubungan partisipatif. Dalam pola ini, peran pemerintah pusat semakin berkurang, karena daerah telah mencapai tingkat kemandirian yang lebih tinggi dan mampu mengelola urusan otonominya dengan lebih mandiri.
4. Pola hubungan delegatif. Dalam pola ini, campur tangan pemerintah pusat sudah tidak ada karena daerah telah sepenuhnya mampu dan mandiri dalam melaksanakan seluruh urusan daerah tanpa bergantung pada bantuan dari pemerintah pusat.

Dalam melihat pola hubungan pemerintah pusat dan daerah dengan kemandirian daerah dari sisi keuangan dapat diilustrasikan pada tabel berikut.

Tabel 2.1 Pola Hubungan Pemerintah Pusat Dan Daerah

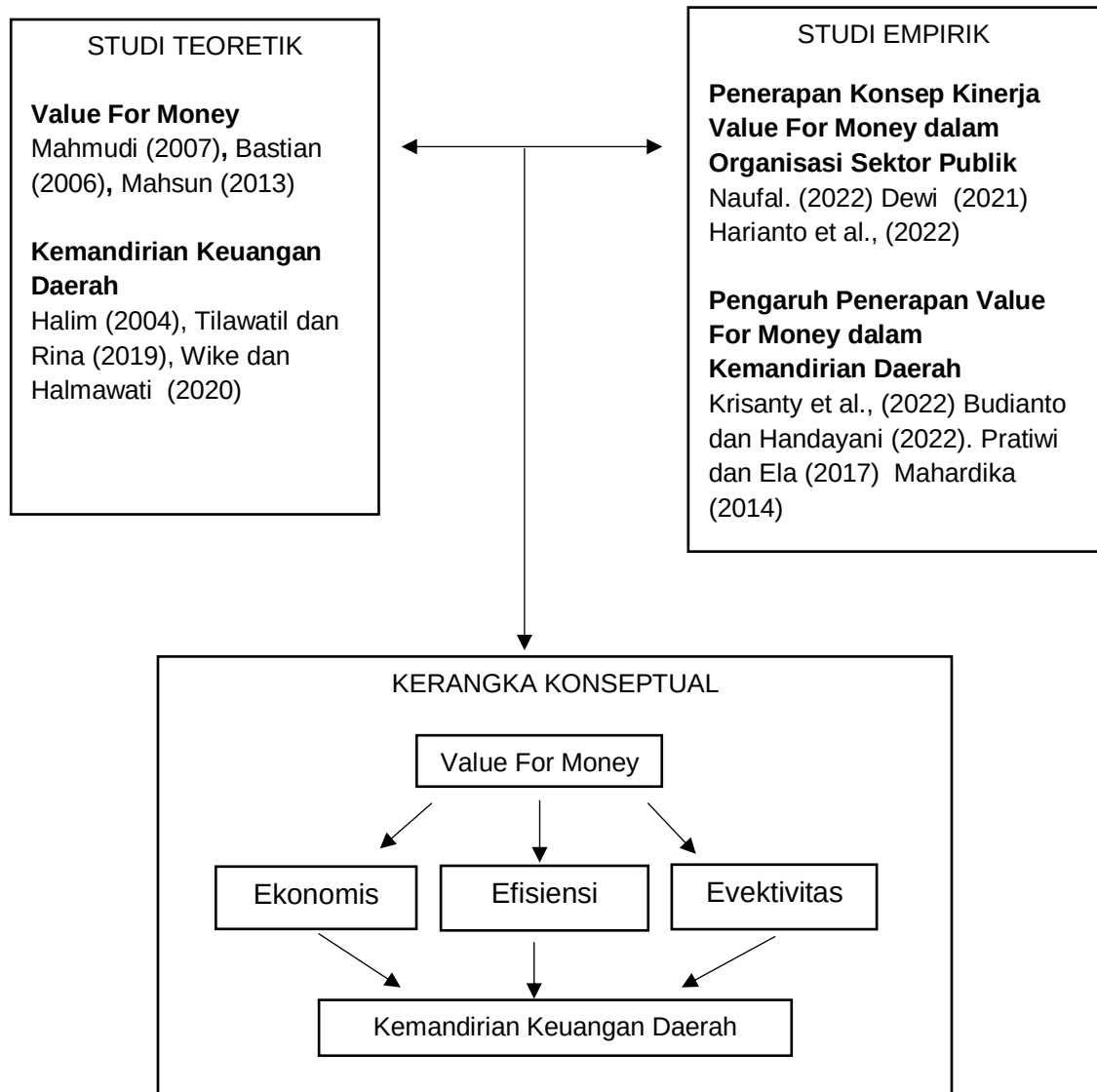
Pola Hubungan Pemerintah pusat dan Daerah	Kemampuan Keuangan	Rasio Kemandirian
Instruktif	Rendah Sekali	0-25%
Konsultatif	Rendah	>25-50%
Partisipatif	Sedang	>50-75%
Delegatif	Tinggi	>75-100%

Sumber: Halim (2004)

2.2 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran terdiri dari bagan yang berisi mengenai gambaran penyusunan skripsi yang terdiri atas studi teoritik dan studi empirik, serta kerangka konseptual. Untuk memudahkan pemahaman terhadap permasalahan yang akan diteliti, dapat digunakan model kerangka pemikiran penelitian seperti yang diilustrasikan berikut ini.





Gambar 2.2 Kerangka Pemikiran

